

SIARAN PERS



Nomor: 30/HMS/SP/VI/2026

Tanggal: 26 Juni 2026

Pertanyaan Kritis Peserta Warnai Diskusi RP4 Bawaslu Jakarta Barat Bersama Komnas Perempuan

Jakarta Barat – Diskusi dalam kegiatan Ruang Penguatan Perspektif Pengawasan Partisipatif (RP4) yang diselenggarakan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat berlangsung interaktif. Salah satu sesi yang menarik perhatian muncul ketika salah seorang peserta, Lulu Azizah dari Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, mengajukan pertanyaan mengenai batas waktu pelaporan kasus kekerasan seksual kepada narasumber dari Komnas Perempuan, Devi Rahayu.

Pertanyaan tersebut menyoroti kondisi korban yang baru memiliki keberanian untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual setelah bertahun-tahun berlalu.

"Apabila peristiwa kekerasan seksual terjadi lima tahun yang lalu dan korban baru berani melapor saat ini, apakah laporan tersebut masih dapat diproses?" demikian pertanyaan yang diajukan dalam forum diskusi.

Menanggapi hal tersebut, Devi Rahayu menjelaskan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual perlu dipahami tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari perspektif psikologis korban. Menurutnya, setiap korban memiliki proses pemulihan yang berbeda-beda sehingga keberanian untuk melapor sering kali membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Dalam pemaparannya, Devi juga menjelaskan bahwa pengaturan mengenai penanganan tindak pidana kekerasan seksual telah mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi tersebut memberikan penguatan terhadap perlindungan korban serta memperluas perspektif dalam proses pembuktian, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Diskusi tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi peserta untuk memahami bahwa penanganan kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek hukum, psikologis, dan perlindungan terhadap hak-hak korban.

SIARAN PERS



Melalui kegiatan RP4, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat berupaya menghadirkan ruang diskusi yang mendorong peningkatan wawasan serta sensitivitas seluruh peserta terhadap berbagai isu strategis, termasuk perlindungan perempuan dan kelompok rentan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat budaya kerja yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat

Jl. Kebon Jeruk Raya No. 64A,

Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat 11530

